

**PROGRAM APRESIASI BAGI PEMERINTAH DAERAH (PEMDA) DALAM
MELAKSANAKAN TATA KELOLA (*GOOD GOVERNANCE*) GUNA
MEMAJUKAN KEPARIWISATAAN DI DAERAH**

Ismayanti, Titin Astuti, Ina Djamhur, Sutyastie Soemitro Remi
Universitas Sahid Jakarta

ABSTRACT

The success of region is largely determined by the commitment of the local government in the development of tourism. Good governance will certainly provide prosperity for the community. This first year multi-disciplinary research has a purpose: to design blueprint appreciation program for local governments that are committed in developing regions of Tourism through good governance and delivering award of appreciation to the government. This study examines several aspects of appreciation through commitment identification and governance survey using analytical methods of AHP. Tourism appreciation blueprint is implemented with program testing. The results achieved is the publication and implementation of the blueprint of appreciation in cooperation with the Eljohn Publishing through Travel Club Tourism Award 2012 from the magazine Travel Club. The results is 40 nominees from the provincial governments, district and city governments. From the nominees, it is determined the winner of the provincial government consisting of 3 province, 9 city and 13 district government. Positive implications occurs after administration of appreciation and local prideness increases when each winner received awars and regional leaders gave speech in front of live audience and broadcasting live all over Indonesia. Besides these, dignity of each government showed in local and national publications in the electronic media and print media. Of these positive implications, it is recommended to conduct a similar program on a regular basis and measured the impact of the annual tribute to the development of tourism in the area so that the program becomes one measure the progress of regional tourism.

Keywords: *Good Governance, Government, Tourism Development*

1. PENDAHULUAN

Pariwisata tak hanya memberikan kontribusi terhadap pembangunan, namun juga telah mampu menjadi salah satu ujung tombak penghasil devisa bagi negara. Kekayaan alam Indonesia berupa flora dan fauna, juga peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya menjadi modal utama untuk pengembangan dunia pariwisata. Pembangunan tak hanya untuk kemakmuran semata namun harus pula mampu menciptakan pariwisata yang berkualitas. Pemerintahan daerah (Pemda) seyogyanya menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan regulator dalam membangun pariwisata berkelanjutan untuk Indonesia di masa depan.

Tugas dan tanggung jawab Pemda setelah diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004) yang menyangkut pelaksanaan otonomi daerah menjadi lebih berat dan kompleks. Pemda harus mampu membuat suatu perencanaan pembangunan Pariwisata yang matang untuk memajukan Pariwisata daerahnya. Dalam usaha mempercepat pembangunan dan kemajuan daerah, pemda sering mengabaikan dampak kegiatannya sehingga tidak mensejahterakan tapi justru memberatkan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari:

1. Banyaknya Pemda yang tidak memposisikan sektor Pariwisata dalam sektor unggulan daerah. Umumnya Pemda menempatkan sektor Pertanian, Pertambangan dan Industri menjadi sektor Unggulan.
2. Sedikit Pemda yang memiliki sebuah kedinasan khusus urusan Pariwisata Daerah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar). Banyak kedinasan urusan Pariwisata yang digabungkan dengan beragam urusan lain contoh: Dishubpar (Dinas Hubungan dan Pariwisata) dan Disporabudpar (Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata).
3. Seringnya terjadi mutasi Kepala Dinas urusan Pariwisata di Daerah.
4. Kesenjangan latar belakang keilmuan para personil di Dinas Pariwisata Daerah dengan kebutuhan keparariwisataannya dalam Kepariwisataan, contoh: Kepala Dinas Pariwisata berlatar belakang sarjana Teknik Mesin.
5. Banyak terjadi degradasi moral Pemda terutama terkait dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) termasuk alokasi untuk sektor Pariwisata.

Penelitian yang bersifat multi-disiplin ini bermaksud untuk merancang sebuah *blueprint* program apresiasi bagi Pemda (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten) yang memiliki komitmen tinggi melalui tata kelola pembinaan pengembangan Pariwisata di daerahnya masing-masing, serta mengujicobakan blueprint tersebut. Istilah 'Tata kelola' atau *Good Governance* mulai banyak digunakan di berbagai literatur. Tata kelola yang buruk seringkali dituding sebagai penyebab masalah-masalah di masyarakat sehingga banyak pihak yang menjadi tata kelola sebagai ukuran keberhasilan sebuah daerah. Tata kelola erat berkaitan dengan pemerintahan dan bukan merupakan konsep baru. Tata kelola didasari pada peradaban masyarakat. Kata Pemerintah memiliki beragam arti diantaranya:

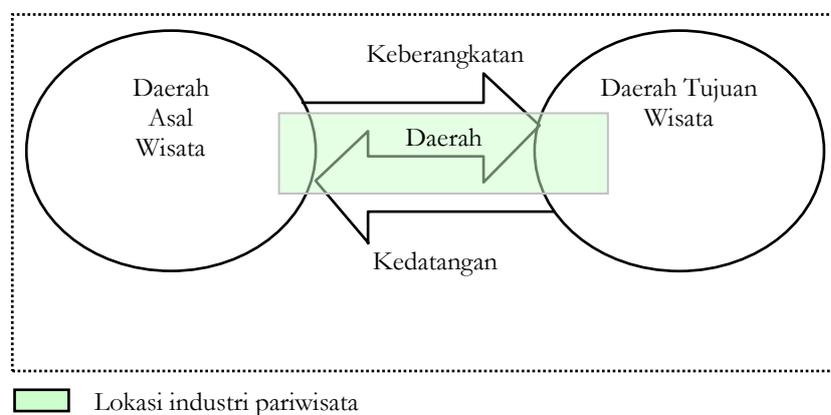
- a. Proses pembuatan keputusan dan proses dimana keputusan diimplementasikan (atau tidak diimplementasikan). (Unescap, 2011)
- b. Praktek kekuasaan atau otoritas (politik, ekonomi, administratif dan lainnya) untuk mengelola sumber daya daerah. (Ausaid, 2000)

Tata kelola diartikan sebagai kompetensi manajemen sumber daya wilayah dalam etika yang terbuka, transparan, akuntabel, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dipastikan, dengan melakukan tata kelola yang baik, maka korupsi dapat diminimalisasi, persepsi negatif dapat dihindari, buruk sangka tidak terjadi karena seluruh proses dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Pariwisata adalah sebuah fenomena yang unik. Konsep tentang pariwisata rumit dan dapat ditetapkan dari beragam perspektif. Dalam undang-undang tentang Kepariwisataan nomor 10 tahun 2009 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara
- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Pariwisata, menurut Leiper dalam Cooper et.al (2005:6) memuat tiga elemen utama yang menjadikan kegiatan tersebut bisa terjadi.

Gambar 1. Sistem Dasar Pariwisata



Sumber: Leiper dalam Cooper et.al (2005:6)

Pariwisata dalam berjalan dengan baik melalui keterlibatan tiga pihak yaitu:

(1) Masyarakat

Komunitas lokal di daerah pengembangan pariwisata dimana mereka akan menjadi aktor mengembangkan pariwisata di daerah.

(2) Pihak Swasta

Mereka yang melakukan usaha pariwisata dengan tujuan menyediakan pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

(3) Pemerintah

Pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan daerah yang berperan dalam memfasilitasi pembangunan daerah dan menetapkan kebijakan (peraturan) yang bertujuan mensejahterakan masyarakat.

Masyarakat, pihak swasta dan pemerintah merupakan orang-orang yang memiliki legitimasi minat terhadap pariwisata sehingga merekapun akan memainkan peran yang saling bersinergi dalam memajukan pariwisata di daerah. Dalam Kepariwisataan di Indonesia, keberadaan Pemda diatur dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang

Kepariwisataan bab VIII tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah pasal 29, 30 dan 31. Pemerintah provinsi berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya;
- c. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- d. menetapkan destinasi pariwisata provinsi;
- e. menetapkan daya tarik wisata provinsi;
- f. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan
- h. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pemerintah kabupaten/kota berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Hasil kerja seluruh stakeholder Pariwisata layak untuk mendapatkan apresiasi seperti tertera pada pasal 31.

- (1) Setiap perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkret diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah atau lembaga lain yang tepercaya.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

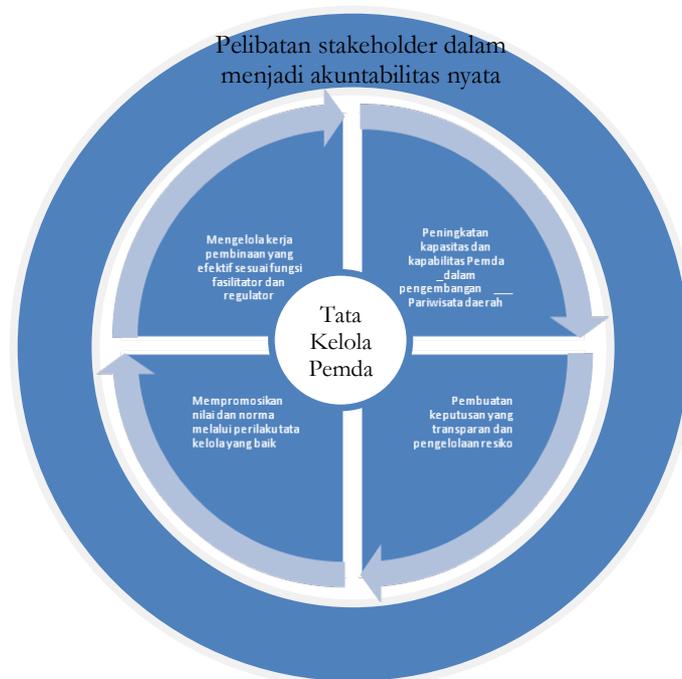
2. METODOLOGI PENELITIAN

Tata kelola Pemda dilaksanakan guna menjalankan tugas dan fungsinya diantaranya:

- Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Pemda dalam pengembangan Pariwisata daerah
- Membuatkan keputusan yang transparan dan pengelolaan resiko
- Mempromosikan nilai dan norma melalui perilaku tata kelola yang baik
- Mengelola kerja pembinaan yang efektif sesuai fungsi fasilitator dan regulator

Kerangka pemikiran yang melandasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Kerangka Pemikiran



Penelitian ini menggunakan variabel penilaian apresiasi atas tata kelola pariwisata yaitu:

- Aspek Tata Pamong

Kesuksesan dan kemajuan pemerintah sangat dipengaruhi oleh manajemen Pemerintah dan aspek ini dilihat dari: kelengkapan organisasi, jumlah SDM dan output kerja.

- Aspek Lingkungan Hidup

Dalam aspek lingkungan hidup, komitmen pemerintah dilihat dari: program pengembangan pariwisata daerah, bentuk pembinaan, pengembangan pariwisata dan keberhasilan pembinaan.

- Aspek Pengembangan Industri Kerakyatan

Upaya pemerintah membina industri kerakyatan dilihat dari: program pembinaan UKM Pariwisata, jumlah UKM Pariwisata, bentuk pembinaan, alokasi anggaran khusus, jumlah HAKI, distribusi hasil UKM Pariwisata dan keberhasilan pembinaan.

d. Aspek Pemberdayaan Masyarakat

Upaya pemerintah membina pemberdayaan masyarakat bidang pariwisata dilihat dari: program peningkatan kemampuan masyarakat, daya serap tenaga kerja sektor Pariwisata, bentuk pembinaan, alokasi anggaran khusus dan keberhasilan pembinaan.

e. Aspek Ekonomi

Dalam aspek ekonomi, kesuksesan dan kemajuan pemerintah dilihat dari: total nilai APBD di tahun 2010 dan 2011, prosentasi sektor pariwisata dalam APBD, 7 (tujuh) sektor unggulan di daerah, target dan realisasi PAD sektor pariwisata tahun 2010 dan 2011, besaran anggaran promosi daerah, target dan realisasi jumlah wisman dan wisnus dan neraca satelit pariwisata.

Populasi penelitian ini adalah seluruh pemda di Indonesia. Penelitian tidak menggunakan metode sampling tetapi seluruh populasi diteliti mengingat penelitian ini bersifat strategis dan nasional. Objek penelitian adalah dinas-dinas pariwisata di tingkat Provinsi, tingkat Kotamadya dan tingkat Kabupaten.

Data yang digunakan ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari hasil pengumpulan data langsung ke sumber dan informan. Mereka adalah:

- a. Para ahli Kepariwisataan dan Tata Kelola Pemerintahan
- b. Dinas-dinas pariwisata dari beragam tingkatan

Data sekunder berasal dari dokumen pemerintah, data statistik, literatur dan jurnal penelitian.

Dalam mengumpulkan data dilakukan teknik-teknik berikut:

a. Jajak Pendapat

Data dan informasi akan dikumpulkan dengan jajak pendapat kepada seluruh pemda dengan menggunakan kuesioner tertutup. Kuesioner digunakan untuk mengidentifikasi komitmen pemda terhadap pengembangan pariwisata. Kuesioner memuat seluruh aspek apresiasi terhadap tata kelola pariwisata daerah.

b. Pengamatan Lapangan

Pengamatan lapangan diperlukan untuk melakukan verifikasi atas isian dalam kuesioner. Daftar cek digunakan dalam pengamatan lapangan untuk mengidentifikasi program-program yang dilakukan oleh Pemda dalam melaksanakan tata kelola yang baik. Daftar cek akan memuat seluruh aspek apresiasi terhadap tata kelola pariwisata daerah.

c. *In-depth Interview*

In-depth Interview dilakukan untuk melakukan verifikasi atas isian dalam kuesioner. Pemda diundang untuk melakukan presentasi dan diskusi tanya jawab terkait dengan program pembinaan kepariwisataan dan daerah.

d. Uji *Blueprint* Program Apresiasi Tata Kelola Pariwisata

Program apresiasi akan diuji cobakan melalui penyelenggaraan kegiatan Tourism Award. Penyelenggaraan kegiatan ini membutuhkan dana yang cukup besar sehingga peneliti akan menggandeng institusi lain yaitu El-John Publishing sebagai mitra penyelenggara..

Penelitian pada tahun pertama menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*) digunakan untuk merumuskan aspek-aspek dalam *blueprint* program apresiasi. Metode AHP adalah model pendukung pembuatan keputusan yang akan menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks mejadi suatu hierarki. AHP digunakan karena mampu membuat keputusan secara hierarkis. Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis. Penilaian menggunakan AHP melibatkan informan kunci atau narasumber yang merupakan ahli pada bidangnya. Narasumber yang ahli dalam Kepariwisataan dan Kepemerintahan akan digunakan untuk memberikan keparakannya terhadap pembobotan aspek-aspek apresiasi tata kelola. Mereka adalah:

- a. Pengusaha Pariwisata (Pemiliki Usaha Kawasan Pariwisata dan Media Informasi Pariwisata)
- b. Akademisi dan Masyarakat
- c. Pemerintah Pusat (Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian melibatkan mahasiswa dan menggandeng pihak Eljohn Publishing (Majalah Travel Club). Keterlibatan pihak Eljohn Publishing diperkuat dengan ditandatanganinya nota kesepakatan kerja. Kemitraan dibuat berdasarkan asa saling membantu dan mutual dengan prinsip kemitraan yang jujur, terbuka dan dilandasi itikad baik. Hasil kemitraan berupa berbagi data, informasi dan bentuk lain yang dapat digunakan oleh tim peneliti dan El-John Media untuk manfaat bersama. Hasil samping kemitraan penelitian yang berupa publikasi dapat dimanfaatkan bersama secara proporsional. Jika hasil kemitraan penelitian tersebut berpotensi menjadi kekayaan intelektual, maka pemanfaatannya diatur sebagai berikut:

BLUEPRINT PROGRAM APRESIASI PEMDA

Penelitian menetapkan nilai dan norma penelitian. Nilai dan norma ditetapkan karena keluaran dari penelitian adalah program apresiasi kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan kepariwisata. Program dibedakan dalam tiga kategori yaitu:

1. *The Best Performance*, diberikan pada pemda yang memiliki nilai tertinggi dalam seluruh aspek yaitu tata kelola, lingkungan, pembinaan UKM, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi.
2. *The Most Improved*, diberikan pada pemda yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dalam berbagai aspek seperti: UKM, pemberdayaan dan ekonomi.
3. *The Best Achievement* diberikan kepada pemda yang menunjukan komitmen melalui pencapaian target-target yang telah ditetapkan, terutama dalam aspek ekonomi.

Tabel 1. Nilai Penelitian

	Nilai Kuesioner (40%)						Nilai Verifikasi (60%)					
	Aspek Tata Kelola	Aspek Lingkungan	Aspek UKM	Aspek Pemberdayaan	Ekonomi	Total	Aspek Tata Kelola	Aspek Lingkungan	Aspek UKM	Sumberdayaan	Ekonomi	Total
	20%	20%	20%	20%	20%	100%	20%	20%	10%	25%	25%	100%
The best performance												
The most improved												
The best achievement												

Pemenang untuk tiga kategori yang ditetapkan didasarkan dari hasil penilaian yang komponen yang berbeda yaitu:

1. *The best performance* dinilai dari nilai total kuesioner ditambah dengan nilai verifikasi.
2. *The most improved* dinilai dari nilai aspek UKM, pemberdayaan dan ekonomi ditambah dengan nilai verifikasi.
3. *The best achievement* dinilai dari nilai ekonomi ditambah dengan nilai verifikasi.

Dasar penilaian disusun dalam norma penilaian dan kembali, norma ditetapkan berdasarkan pendapat para pakar melalui AHP. Norma penilaian dipublikasikan kepada pemda agar mereka paham cara penilaiannya.

HASIL PENILAIAN KUESIONER APRESIASI PEMDA

Dari hasil pengisian kuesioner, data dikompilasi berdasarkan aspek-aspek dengan ketentuan penilaian yang telah ditetapkan dalam norma penilaian dan didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Pembobotan Kuesioner dan Verifikasi Apresiasi Pemda 2012

Nama Pemda	Jenis Pemda	Nilai Kuesioner						Nilai Verifikasi						Total
		Aspek Tata Kelola	Aspek Lingkungan	Aspek UKM	Aspek Pemberdayaan Masyarakat	Aspek Ekonomi	Jumlah Kuesioner	Aspek Tata Kelola	Aspek Lingkungan	Aspek UKM	Aspek Pemberdayaan Masyarakat	Aspek Ekonomi	Jumlah Verifikasi	
Aceh	Prov	276	4	12	0	21	313	0	0	0	0	0	0	0
Bali	Prov	128	10	18	15	57	228	10	10	9	9	10	96	324
Banten	Prov	118	7	13	8	33	179	8	7	7	6	9	74	253
DIY	Prov	400	8	17	13	47	485	0	0	0	0	0	0	0
Kalimantan Timur	Prov	92	9	13	12	40	166	8	6	7	6	8	70	236
Babel	Prov	113	8	14	9	54	198	9	8	6	8	7	77	275
Lampung	Prov	176	9	19	3	48	255	0	0	0	0	0	0	0
NTB	Prov	108	10	18	12	53	201	9	9	9	9	9	90	291
Sumatera Barat	Prov	37	9	18	9	41	114	0	0	0	0	0	0	0
Sumatera Selatan	Prov	149	10	8	8	46	221	0	0	0	0	0	0	0
Balikpapan	Kota	52	9	14	8	48	131	9	9	8	8	10	89	220
Banda Aceh	Kota	31	10	6	9	20	76	9	6	7	8	8	77	153
Denpasar	Kota	68	8	13	9	33	131	9	9	8	10	9	91	222
Malang	Kota	76	10	16	14	29	145	10	10	9	10	10	99	244
Padang	Kota	78	3	4	14	26	122	0	0	0	0	0	0	0
Pangkal Pinang	Kota	54	6	1	10	55	126	10	9	9	10	10	97	223
Pekan Baru	Kota	64	10	11	9	35	129	0	0	0	0	0	0	0
Sawah Lunto	Kota	56	9	9	7	44	125	10	10	9	8	8	89	214
Semarang	Kota	70	10	10	7	27	124	9	9	7	8	6	78	202
Surakarta	Kota	108	8	14	13	37	180	10	9	7	9	7	85	265
Tanjung Pinang	Kota	92	10	17	8	49	176	0	0	0	0	0	0	0
Tomohon	Kota	107	9	16	15	49	196	10	10	8	9	9	93	289

Nama Pemda	Jenis Pemda	Nilai Kuesioner						Nilai Verifikasi						Total
		Aspek Tata Kelola	Aspek Lingkungan	Aspek UKM	Aspek Pemerintahan Masyarakat	Aspek Ekonomi	Jumlah Kuesioner	Aspek Tata Kelola	Aspek Lingkungan	Aspek UKM	Aspek Pemerintahan Masyarakat	Aspek Ekonomi	Jumlah Verifikasi	
Banyumas	Kab	77	10	15	7	33	142	8	10	7	9	10	90	232
Banyuwangi	Kab	101	10	15	7	36	169	10	10	9	10	10	99	268
Berau	Kab	87	4	11	4	43	149	8	6	8	8	9	78	227
Cianjur	Kab	44	5	7	8	29	92	0	0	0	0	0	0	0
Gianyar	Kab	61	5	14	6	24	110	10	10	10	10	10	100	210
Kendal	Kab	96	3	10	5	25	139	8	7	9	9	7	79	218
Labuhan Batu Utara	Kab	87	10	8	13	53	174	0	0	0	0	0	0	0
Magelang	Kab	105	6	8	13	24	156	9	8	7	7	9	81	237
Malang	Kab	80	9	16	7	38	150	8	8	6	6	7	70	220
Muara Enim	Kab	88	7	11	8	33	147	0	0	0	0	0	0	0
OKI	Kab	98	10	11	7	19	145	9	7	7	8	7	76	221
OKU	Kab	149	12	19	15	49	244	9	7	6	7	7	73	317
Purbalingga	Kab	89	10	9	8	56	172	8	8	7	8	8	79	251
Raja Ampat	Kab	56	10	17	10	29	122	8	8	8	6	9	77	199
Semarang	Kab	51	7	2	7	13	79	9	6	8	7	8	75	155
Sumedang	Kab	70	11	11	8	49	149	0	0	0	0	0	0	0
Wajo	Kab	140	6	16	13	39	214	8	7	7	9	7	77	291
Wonogiri	Kab	67	9	13	8	33	130	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 2 menunjukkan pemeringkatan nominator sementara yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil kuesioner dan hasil tersebut menjadi acuan dalam melakukan verifikasi baik melalui wawancara maupun melalui kunjungan lapangan ke instansi yang bersangkutan. Ada beberapa kolom bernilai 0 yang menunjukkan bahwa pemda dari provinsi, kabupaten dan kota tidak mendapatkan nilai karena mereka tidak hadir dalam wawancara atau mereka tidak bersedia dikunjungi untuk survey lapangan. Hasil verifikasi pun mensortir jumlah nominator guna mencari pemenang penerima penghargaan apresiasi pemda. Hasil verifikasi menunjukkan hanya ada 6 pemprov, 9 pemkot dan 13 pemkab yang berhak untuk masuk ke babak penjurian.

PEMBERIAN APRESIASI PEMDA

Hasil penilaian kuesioner dan hasil verifikasi digabungkan guna menentukan penerima penghargaan apresiasi pemda. Hasilnya adalah sebagai berikut:

a. Kategori Kinerja atau *Performance*

1) Untuk provinsi ada satu pemenang yaitu: Pemprov. Bali. Provinsi Bali layak menduduki peringkat tertinggi karena hasil penilaian kuesioner dan verifikasi menunjukkan nilai tertinggi untuk diberbagai aspek. Provinsi Bali memang sudah teruji sebagai sebuah provinsi yang menjadi destinasi dunia dan pemda provinsi Bali merasakan manfaat dari pengembangan pariwisata di daerahnya sehingga mereka pun sangat peduli pada pengembangan pariwisata di Bali. Masyarakat juga menikmati hasil dari industri pariwisata tersebut, ada yang bekerja di usaha pariwisata dan ada pula yang membuka usaha pariwisata.

2) Untuk pemkot

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. <i>The Best Performance</i> | : Pemkot. Surakarta |
| 2. <i>1st Runner Up</i> | : Pemkot. Sawahlunto |
| 3. <i>2nd Runner Up</i> | : Pemkot Semarang |

Para pemenang dalam kelompok pemkot mendapatkan nilai berurutan dari yang tertinggi hingga terendah dari setiap aspek penilaian baik kuesioner maupun verifikasi.

3) Untuk Pemkab

Kabupaten Gianyar layak menduduki posisi tertinggi dari kategori ini dikarenakan untuk seluruh komponen aspek menunjukkan angka paling tinggi. Posisi kedua sebenarnya diduduki oleh Kab. Banyumas, tetapi kabupaten ini menjadi pemenang (posisi ke satu) untuk kategori *The Most Improved* khususnya untuk perkembangan dari aspek Ekonomi. Oleh karena itu, posisi kedua dan ketiga di kategori ini adalah Kab. Berau (Prov. Kalimantan Timur) dan Kab. Raja Ampat. Kab. Ogan Komering Ilir dan Kab. Wajo yang seharusnya menjadi pemenang dikategori ini juga, adalah pemenang ketiga untuk kategori *The Most Improved*. Sementara itu untuk Kab. Wajo tidak terpilih didalam kategori ini, karena telah dipilih sebagai pemenang kedua dalam *The Best Achievement*.

b. Kategori Perkembangan atau *Improved*

1) Untuk pemprov, dimenangi oleh pemprov Nusa Tenggara Barat. Jika dilihat dari nilai total, memang NTB tidak mendapatkan nilai akhir tertinggi tetapi provinsi NTB dijadikan pemenang dalam kategori *most improved* karena provinsi ini memiliki bobot aspek yang tertinggi. Bobot seluruh aspek meliputi keseluruhan aspek yang ada dalam penilaian yaitu: aspek tata kelola, aspek lingkungan, aspek UKM, aspek pemberdayaan masyarakat dan aspek ekonomi. Dari seluruh aspek, prov NTB memberikan

peningkatan yang sangat signifikan sehingga sudah sewajarnya NTB menjadi pemenang dalam kategori ini.

2) Untuk pemkot:

Pemenang utama atau *the most improved* adalah pemkot Malang, kemudian pemkot Pangkal Pinang menjadi *1st runner up* dan *2nd runner up* adalah pemkot Denpasar. Ketiganya menduduki peringkat teratas dari kategori *most improved* yang dinilai dengan pertumbuhan antara tahun 2010 dan tahun 2011.

3) Untuk pemkab

1. *The Most Improved* : Pemkab. Banyuwangi
2. *1st Runner Up* : Pemkab. Magelang
3. *2nd Runner Up* : Pemkab. Ogan Komering Ilir
4. *3rd Runner Up* : Pemkab. Semarang

Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten paling timur dari Provinsi Jawa Timur ini tidak ada henti-hentinya mengembangkan dan mempromosikan industri pariwisatanya dan membuahkan hasil dengan keluar sebagai pemenang. Urutan kedua dan ketiga seharusnya dipegang oleh Kab. Gianyar dan Kab. Banyumas, namun hal itu tidak terjadi, karena Kab. Gianyar telah terpilih sebagai pemenang *the Best Performance* dan Kab. Banyumas adalah pemenang untuk kategori *The Best Achievement*. Kab. Magelang menduduki urutan kedua sebagai *1st Runner Up*. Sementara untuk *2nd Runner Up* dan *3th Runner Up* adalah Kab. Ogan Komering Ilir dan Kab. Semarang. Kab. Raja Ampat tidak terpilih sebagai salah satu pemenang untuk kategori ini, karena telah dipilih sebagai *2nd runner Up* untuk *The Best Performance*. Begitupun Kab. Berau, Kab. Wajo dan Kab. Kendal tidak terpilih sebagai pemenang di kategori ini karena telah menjadi pemenang di kategori lain, misalnya Kab. Berau telah didaulat sebagai pemenang (*1st Runner Up*), Begitupun dengan Kab. Wajo dan Kab. Kendal masuk dalam kategori *The Best Achievement* sebagai pemenang *3rd Runner Up* dan *4th Runner Up*.

c. Kategori Pencapaian atau *Achievement*

- 1) Untuk pemprov, dimenangi oleh pemprov Kep Babel. Provinsi Babel menjadi pemenang dalam kategori pencapaian karena provinsi ini menunjukkan komitmennya dalam pencapaian sasaran setiap tahunnya. Pemprov Babel terus berupaya menetapkan target dan berusaha memenuhinya sehingga pemprov ini menjadi unggulan kategori pencapaian. Target yang ditetapkan misalnya: jumlah kunjungan wisatawan domestik dan internasional, jumlah pendapatan pariwisata dan jumlah regulasi yang dibuat.

2) Sementara pemenang untuk pemkab adalah:

1. *The Best Achievement* : Pemkab. Banyumas
2. *1st Runner Up* : Pemkab. Wajo
3. *2nd Runner Up* : Pemkab. Purbalingga
4. *3rd Runner Up* : Pemkab. Kendal

Kab. Banyumas yang berada di Prov. Jawa Timur merupakan kabupaten yang memiliki komitmen tinggi terhadap pariwisata melalui pencapaian target. Kabupaten ini menduduki peringkat pertama, diikuti dengan Kab. Wajo, Kab. Purbalingga dan Kab. Kendal. Kab. Ogan Komering Ilir tidak masuk dalam kategori ini karena telah terpilih sebagai pemenang (*3rd runner Up*) untuk kategori *the Most Improved*. Sementara itu Kab. Raja Ampat tidak dimasukkan sebagai pemenang untuk kategori ini, karena telah menjadi pemenang di kategori *The Best Performance* sebagai *2nd Runner Up*. Adapun Kab. Magelang sudah dinobatkan sebagai salah satu pemenang di kategori *Most Improved* dan untuk Kab. Berau telah terpilih sebagai *1st Runner Up* untuk kategori *the Best Performance*.

3) Untuk pemkot adalah:

1. *The Best Achievement* : Pemkot. Tomohon
2. *1st Runner Up* : Pemkot. Balikpapan
3. *2nd Runner Up* : Pemkot. Banda Aceh

Pemenang atau *the best achievement* adalah pemkot Tomohon. Meski dari penilaian pemkot Tomohon berada diposisi kedua, tetapi ia dijadikan utama karena pemkot Malang yang mendapatkan nilai lebih tinggi telah mendapatkan apresiasi di kelompok yang lebih tinggi. Agar tidak ada dominasi pemenang, maka tim juri menyepakati pemkot Tomohon yang berada pada posisi kedua menjadi *the best achievement*. Sementara pemkot Balikpapan yang berada diperingkat berikutnya menjadi *1st runner up* dan pemenang *2nd runner up* adalah pemkot Banda Aceh. Sama dengan kondisi pemkot Tomohon, pemkot Banda Aceh menjadi *2nd runner up* karena pemkot-pemkot yang bernilai lebih besar dan berada pada peringkat yang lebih tinggi seperti: pemkota Sawahlunto, Pangkal Pinang, Surakarta, Denpasar dan Semarang, telah mendapatkan penghargaan di kategori yang lebih tinggi, sehingga tim juri menyepakati penerima *2nd runner up* adalah Pemkot Banda Aceh.

4. KESIMPULAN

Program apresiasi bagi pemda melalui penganugerahan *Travel Club Tourism Award* (TCTA) 2012 adalah wujud penghargaan bagi pemerintah daerah mulai dari pemerintah provinsi (Pemprov), pemerintah kota (Pemkot) hingga pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang senantiasa melakukan pembinaan bidang kepariwisataan dalam upaya menjalankan

fungsinya sebagai fasilitator dan regulator. TCTA 2012 merupakan hasil kerjasama antara Eljohn Publishing dan tim Stranas. Penilaian TCTA 2012 yang merupakan program apresiasi pmda didasarkan pada lima aspek yaitu: aspek tata kelola, aspek lingkungan, aspek UKM, aspek pemberdayaan masyarakat dan aspek ekonomi. Dari lima aspek diberikan pembobotan dalam penilaian berdasarkan hasil rebug dalam AHP dan ditentukan porsi nilai kuesioner sebesar 40 persen dan porsi nilai verifikasi sebesar 60 persen. Pemenang untuk tiga kategori yang ditetapkan didasarkan dari hasil penilaian yang komponen yang berbeda yaitu:

- a. *The best performance* dinilai dari nilai total kuesioner ditambah dengan nilai verifikasi.
- b. *The most improved* dinilai dari nilai aspek UKM, pemberdayaan dan ekonomi ditambah dengan nilai verifikasi.
- c. *The best achievement* dinilai dari nilai ekonomi ditambah dengan nilai verifikasi.

Keikutsertaan pemerintah provinsi (Pemprov), pemerintah kota (Pemkot) hingga pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk terus memajukan Kepariwisata di daerahnya menjadi sangat penting. Dari hasil penyebaran kuesioner dan penilaian disepakati sejumlah 25 pemenang yang terdiri dari: 3 pemprov, 9 pemkot dan 13 pemkab.

REFERENSI

- Cooper, et. Al. 2008. *Tourism: Principle and Practice*. Pearson Education
- Doumpos, M, Zopounidis, C. 2002. *Multicriteria Decision Aid Classification*. Dordrecht: Kluwer Academic Publisher
- Goymen, K. 2000. "Tourism and Governance in Turkey". *Annals of Tourism Research*. 27 (4): 1025-1048
- Kaplan, R.S., Norton, D.P. `1996. *The Balanced Score Card*. US: The President and Fellows of Harvard College
- Neumayer, E. 2002. "Is Good Goverance Rewarded?" *World Development*. 30 (6): 913-930
- Price, R., Roman, F.J, Rountree, B. 2010. "The Impact of Governance Reform on Performance and Transparance". *Journal of Financial Economics*. 99 (2011): 76-96
- Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata
- Yuksel, F., Bramwell, B., Yuksel, A. 2005. "Centralized and Decentralized Tourism Governance in Turkey". *Annals of Tourism Research*. 32 (3): 859-886